



KAJIAN POSISI KERJASAMA INDONESIA DALAM KERANGKA RCEP TERHADAP KINERJA EKSPOR DAN INVESTASI PASCA COVID-19

Viktor Tulus Pangapoi Sidabutar^{1*}

victor.sidabutar@yahoo.com

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan kerjasama regional yang memiliki ukuran pasar 48% dari populasi dunia dan menyumbang 32% dari ekspor barang dunia dan 28% dari Produk Domestik Bruto di mana Indonesia merupakan salah satu anggota di dalamnya. Pandemi COVID-19 membuat kerjasama tersebut terancam akibat terganggunya rantai pasokan global dan mulai munculnya pemikiran untuk memindahkan rantai pasokannya ke negara yang lebih dekat atau melakukan renasionalisasi. Hal ini mengancam posisi Indonesia yang ingin meningkatkan ekspornya secara regional meskipun kerjasama regional tersebut tidak dapat dimanfaatkan Indonesia secara maksimal untuk meningkatkan kinerja ekspornya secara keseluruhan ke negara anggota lainnya. Indonesia sendiri harus berjuang dalam menahan laju penularan COVID-19 di dalam negerinya guna menjaga posisinya dalam rantai pasokan regional dan global dan menjaga kepercayaan investor kepada Indonesia.

Kata Kunci: RCEP, COVID-19, Rantai Pasokan, Ekspor

Abstract

The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is regional cooperation which has a market size of 48% of the world's population and accounts for 32% of the world export of goods and 28% of Gross Domestic Product of which Indonesia is a member. The COVID-19 pandemic has put this cooperation under threat due to the disruption of global supply chains and ideas have started to emerge to move supply chains to closer countries or to renationalize. This threatens the position of Indonesia, which wants to increase its exports regionally even though this regional cooperation cannot be utilized maximally to improve its overall export performance to other member countries. Indonesia itself must struggle to curb the rate of transmission of COVID-19 within its country in order to maintain its position in the regional and global supply chains and maintain investor confidence in Indonesia.

Keywords: RCEP, COVID-19, Supply Chain, Export



PENDAHULUAN

Dunia saat ini memiliki tiga pusat perdagangan, termasuk di dalamnya Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur. Setiap hub melibatkan sejumlah besar perdagangan di dalam wilayahnya dan perdagangan dengan seluruh dunia. Perdagangan yang intensif tersebut kemudian memicu munculnya daerah perdagangan bebas di Amerika Utara dan Uni Eropa. Tetapi Asia Timur tidak memiliki penetapan integrasi regional seperti wilayah tersebut. Kemudian, para pemimpin ASEAN menginisiasi terbentuknya kelompok *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) diluncurkan pada November 2012 dan negosiasinya dimulai pada Mei 2013 (Mahadevan and Nugroho 2019) yang mencakup ASEAN, Cina, Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru (Li and Moon 2018). Dibangun di atas perjanjian perdagangan bebas (FTA) dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), 16 negara RCEP menyumbang 32% dari ekspor barang dunia dan 28% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global (Hsieh et al. 2017) di mana ukuran pasar RCEP meliputi 48% dari populasi dunia hingga cukup besar untuk menciptakan efek penciptaan perdagangan yang positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah ini (Chaisse and Pomfret 2019). ASEAN sendiri telah berupaya untuk menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif dan terintegrasi secara global. Selama beberapa dekade, ASEAN telah menjadi aktor utama dalam berbagai pengaturan kelembagaan di wilayah timur Asia. Berbagai inisiatif kerjasama dan integrasi ekonomi telah menyediakan terbentuknya platform untuk perdagangan dan investasi yang dinamis yang memungkinkan ASEAN untuk berkembang menjadi salah satu kawasan paling dinamis di dunia. Dalam perjalanan konferensi Asia Timur, ASEAN sering menjadi pemain utama, memimpin dan menuntun terjadinya negosiasi dalam bidang perekonomian (Mueller 2019). Selain kemajuan ekonomi, pencapaian signifikan ASEAN lainnya adalah di bidang perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas geopolitik tidak hanya di Asia Tenggara tetapi mencapai wilayah Asia-Pasifik (Santos-Paulino 2019). Tabel 1 menyajikan profil ekonomi dan perdagangan dari negara yang terlibat dalam RCEP dengan India masih ada didalamnya saat pembentukan awal RCEP. Dalam hal luas daratan, Tiongkok, Australia dan India adalah negara dengan ekonomi besar di mana Tiongkok, India, dan Indonesia adalah negara dengan populasi terpadat dalam kelompok tersebut. Dalam hal ukuran PDB, berdasarkan data dari Bank Dunia (2020), Tiongkok sejauh ini merupakan ekonomi terbesar dengan 13,608 milyar dolar AS pada 2018 diikuti oleh Jepang sebesar 4,971 milyar dolar AS dan India sebesar 2,719 milyar dolar AS. Singapura mendapat penghasilan per kapita tertinggi diikuti oleh Australia dan Selandia Baru. Aliran masuk FDI berdasarkan *Balance of Payments* (BoP) ke Tiongkok berdasarkan data Bank Dunia (2020) sangat tinggi yaitu 203,492 miliar dolar AS diikuti dengan Singapura pada 82,04 miliar dolar pada 2018. Rasio perdagangan terhadap persentase PDB tertinggi di Singapura karena perdagangan lebih dari tiga kali lipat PDB Singapura. Pembentukan RECP diharapkan meningkatkan fungsi jaringan produksi di kawasan ASEAN dan negara anggotanya secara efisien. Negosiasi RCEP mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, kekayaan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, *e-commerce*, dan masalah lainnya meskipun negara-negara

yang berpartisipasi dalam RECP juga menandatangani sejumlah FTA bilateral dengan negara-negara anggota lainnya (Chandran 2018).

Pada tahun 2017, pemerintahan Trump mendeklarasikan strategi "*Free and Open Indo-Pacific*" (FOIP) sebagai kebijakan Amerika Serikat (AS) yang baru di Asia. Strategi baru ini akan memiliki implikasi yang luas untuk hubungan AS-Asia dan pemerintahan global (Hsieh 2019). FOIP secara konvensional dianggap berfokus pada dimensi keamanan. Amerika Serikat berharap dengan "bebas" maka semua negara dapat menjalankan kedaulatan mereka bebas dari paksaan oleh negara lain. Sedangkan maksud "terbuka" merujuk pada konektivitas regional, khususnya termasuk kebebasan navigasi. Sehingga diharapkan nantinya akan muncul dimensi ekonomi dimana terjadinya "perdagangan yang adil dan timbal balik" dan "perjanjian yang transparan" (Department of State - United States of America 2019). Perubahan ini diikuti terjadinya perang dagang antara AS dengan Tiongkok yang semakin mendalam dan munculnya pandemi COVID-19 yang memicu reaksi nasionalisme yang dapat mengubah hubungan ekonomi global. Bersamaan dengan perkembangan tersebut, dua perjanjian perdagangan megaregional yang ada, *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) dan RCEP membuat Asia Timur akan memfokuskan kembali hubungan ekonomi di wilayahnya sendiri (Petri and Plummer 2020). Munculnya COVID-19 yang secara resmi diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) menjadi pandemi pada Maret 2020 membuat setiap negara yang berpartisipasi dalam rantai nilai global pasti akan menanggung beban gangguan yang diakibatkan pandemi global. Hal ini mengakibatkan munculnya dua argumen yang saling bersaing di sisi pasokan rantai nilai global; satu sisi akan mempromosikan integrasi lebih lanjut di antara anggota dengan sentral pasokan dari Asia dan yang lainnya kritis terhadap logika ekonomi dan lebih pada mempromosikan logika ideologis. Beberapa negara mulai mengurangi ketergantungannya pada negara lain untuk memproduksi produknya akibat pandemi, contohnya negara Australia dan Selandia Baru yang mulai menghentikan sementara, jika tidak berhenti total, internasionalisasi industrinya di Tiongkok (Gao and Ren 2020). Tetapi CPTPP dan RCEP saat ini tetap dianggap penting meskipun berjalan tanpa Amerika Serikat dan India yang masing-masing pernah dipandang sebagai mitra penting dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tetap dianggap penting karena akan meningkatkan pendapatan nasional secara global pada tahun 2030 setiap tahunnya masing-masing 147 miliar USD dan 186 miliar US. Negara-negara yang akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar adalah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dan merupakan kerugian untuk Amerika Serikat dan India. Perang dagang yang berkelanjutan ini akan menghasilkan kerugian global yang besar dan meningkat menjadi 301 miliar USD setiap tahun pada tahun 2030. Perjanjian dagang ini mengimbangi efek perang perdagangan secara global, tetapi tidak untuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Perang dagang membuat RCEP menjadi sangat berharga karena memperkuat saling ketergantungan di Asia Timur, meningkatkan perdagangan di antara anggota sebesar 428 miliar USD dan mengurangi perdagangan di antara non anggota sebesar 48 miliar USD (Petri and Plummer 2020).

Keluarnya India dari RCEP dikarenakan untuk melindungi pasar domestiknya dari membanjirnya impor tanpa keuntungan dalam jasa dipastikan

akan merubah peta kerjasama kedepannya (Gaur 2020). India telah menjadi salah satu kekuatan regional utama di kawasan Indo-Pasifik dan memegang posisi penting dalam RCEP. Kerjasama regional ini akan memberikan peluang penting bagi negara India untuk berintegrasi ke dalam rantai pasokan di Asia Timur (Hsieh 2019) dikarenakan tingkat pertumbuhan PDB India jauh lebih tinggi daripada banyak negara maju dalam pengelompokan seperti Jepang (0.8 persen), Australia (2.9 persen), Singapura (3.1 persen), dan negara-negara berkembang seperti Tiongkok yang mencatat pertumbuhan 6.8 persen di 2018. India mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi ketiga sebesar 6.8 persen dalam pengelompokan regional ini setelah Kamboja (7.5 persen) dan Vietnam (7.1 persen) pada tahun yang sama. Selain itu, India juga menyediakan pasar yang sangat besar dengan jumlah penduduk tertinggi kedua di RCEP sebesar 1.35 miliar pada tahun 2018 setelah Tiongkok (1.39 miliar). Oleh karena itu, penarikan India dari perjanjian mega-regional ini dapat mengubah dinamika pengelompokan yang ada (Gaur 2020).

Indonesia sendiri mulai menjadi negara yang lebih banyak mengimpor barang dibandingkan memproduksi untuk kebutuhan dalam negeri ataupun untuk diekspor. Bonus demografi Indonesia merupakan target pasar bagi negara-negara anggota RCEP jika Indonesia tidak melakukan pengembangan industri dalam negerinya.

Tabel 1. Profil Ekonomi dan Perdagangan dari Negara Anggota RCEP di tahun 2018 (India masih termasuk di dalamnya)

Indikator	Brunei	Cambodia	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam	Australia	Tiongkok	India	Jepang	Rep. Korea	Selandia Baru
Luas daratan (km ²)	5265	176515	1811569	230800	328.657	653508	298.170	709,2	510.890	310.070	7.682.300	9.326.410	2.973.193	364.485	96.920	264.537
Populasi (juta)	0,423	16,250	267,663	7,062	31,529	53,708	106,652	5,639	69,429	95,540	24,992	1.393	1.353	126,529	51,635	4,886
PDB (milyar dolar AS)	13,567	24,542	1,042	17,954	358,582	71,215	330,91	364,157	504,993	245,214	1.434	13.608	2.719	4.971	1.619	204,924
PDB per kapita (juta dolar AS)	31,628	1,510	3,894	2,543	11,373	1,326	3,103	64,582	7,274	2,567	57,374	9,771	2,010	39,290	31,363	41,945
Pertumbuhan PDB (pertahun %)	0,052	7,498	5,171	6,248	4,742	6,200	6,244	3,139	4,129	7,076	2,94	6,567	6,811	0,788	2,668	2,774
FDI masuk (BoP, milyar dolar AS)	0,512	3,103	20,008	1,32	8,57	1,291	9,802	82,04	13,248	15,5	60,951	203,492	42,117	25,877	14,479	1,61
FDI masuk (% PDB)	3,77	12,642	1,92	7,35	2,39	1,813	2,962	22,529	2,623	6,321	4,251	1,495	1,549	0,521	0,894	0,786
FDI keluar (% PDB)	n/a	0,505	0,61	0	1,594	n/a	1,193	9,977	4,054	n/a	0,157	0,709	0,42	3,2	2,403	0,275
Neraca perdagangan (ribu dolar AS)	2397.118	-6.959.065	-8.496.138	-886.780	29.834.025	-2.673.848	-47.550.348	41.252.322	-1.113.960	6.131.813	26.543.719	359.242.930	-184.523.592	-10.172.797	69.996.799	-3.897.347

Indikator	Brunei	Cambodia	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Filipina	Singapura	Thailand	Vietnam	Australia	Tiongkok	India	Jepang	Rep. Korea	Selandia Baru
Perdagangan (% PDB)	93,896	124,899	43,022	n/a	130,503	n/a	76,059	326,195	123,307	208,307	43,192	38,246	43,378	36,641	83,004	56,4

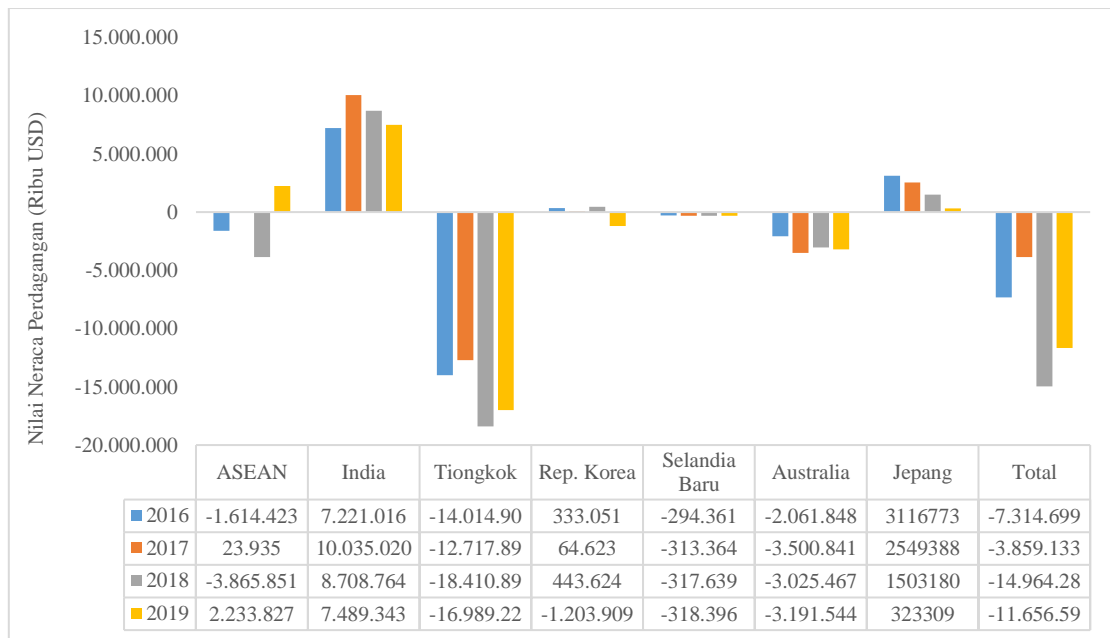
Sumber: Bank Dunia dan Trademap (2020) diolah

Catatan: n/a: tidak ada data

TINJAUAN PUSTAKA

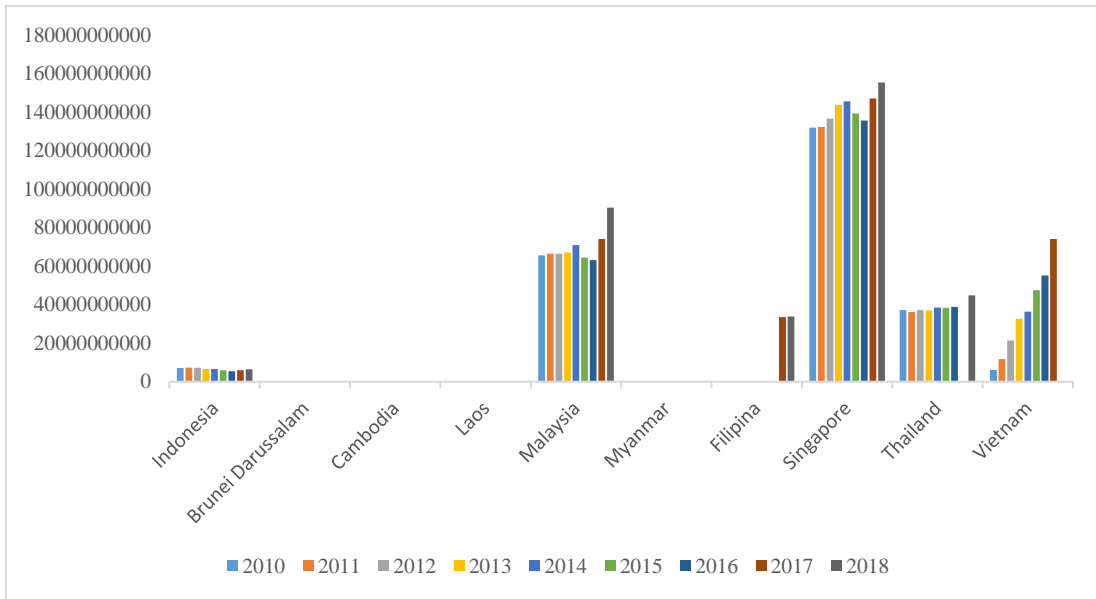
Kinerja Perdagangan Indonesia di ASEAN dan RCEP Sebelum Pandemi

Kinerja perdagangan Indonesia di ASEAN selama kurun waktu 2016 hingga 2019 di ASEAN berdasarkan data dari trademap (2020) menunjukkan angka yang naik turun dimana pada tahun 2016 neraca perdagangan Indonesia -1,614,423 dan sempat kembali minus di angka -3,865,851 sebelum akhirnya naik pada 2019 menjadi 2,233,827 (Gambar 1). Dalam kerangka RCEP, negara yang memberikan nilai positif terhadap neraca perdagangan Indonesia dalam kurun waktu 2016 hingga 2019 adalah India dan Jepang dengan namun secara keseluruhan Kerjasama RCEP membuat Indonesia menjadi target pasar dari negara anggota RCEP (Gambar 1). Indonesia, berdasarkan data *World Development Indicators* dari Bank Dunia (2020) bukanlah negara produsen dan pengekspor produk berteknologi tinggi di ASEAN bahkan mulai tahun 2017 berada dibawah Filipina nilai eksportnya (Gambar 2) dan juga persentase eksportnya (Gambar 3).



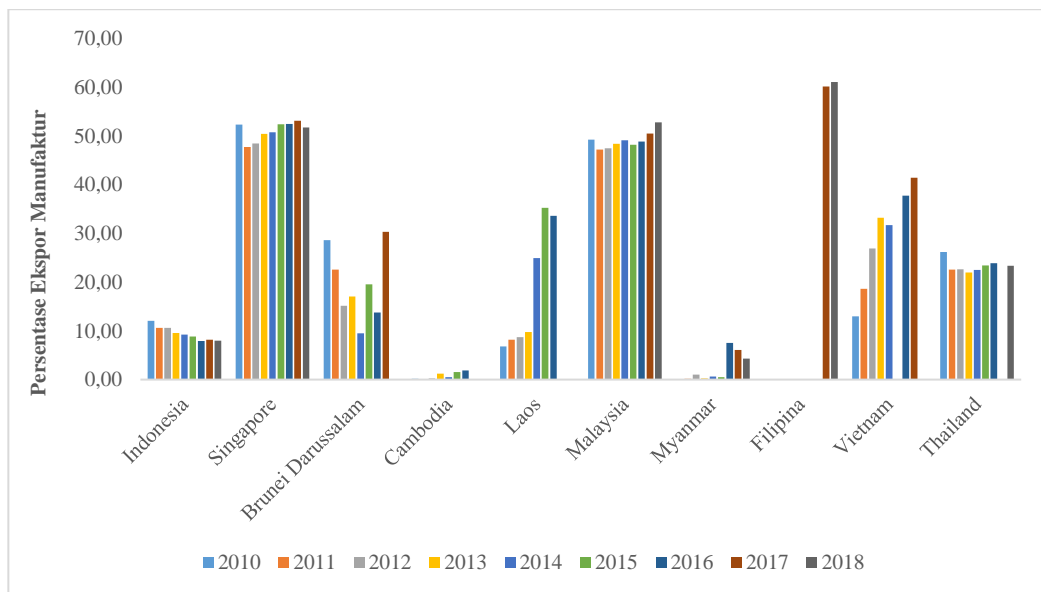
Sumber: Trademap (2020) diolah

Gambar 1. Neraca perdagangan Indonesia tahun 2016-2019 ke negara anggota RCEP dan nilai total keseluruhan



Sumber: Bank Dunia (2020), diolah

Gambar 2. Nilai ekspor produk dengan teknologi tinggi dari negara di ASEAN tahun 2010-2018 (tidak terdapat informasi untuk negara Laos di tahun 2017-2018; Cambodia di tahun 2017-2018; Filipina di tahun 2010-2016; Thailand di tahun 2017; Vietnam di tahun 2018)



Sumber: Bank Dunia (2020), diolah

Gambar 3. Persentase ekspor manufaktur teknologi tinggi dari negara di ASEAN tahun 2010-2018 (tidak terdapat informasi untuk negara Laos di tahun 2017-2018; Cambodia di tahun 2017-2018; Filipina di tahun 2010-2016; Thailand di tahun 2017; Vietnam di tahun 2018)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa Indonesia bergerak menjadi negara yang bergantung terhadap produk impor dan jika dibandingkan dengan total kinerja ekspor ASEAN ke pasar dunia (Tabel 3), kinerja ekspor Indonesia dibandingkan dengan total kinerja ekspor ASEAN adalah 12.59% di tahun 2016, 12.89% di tahun 2017, 12.49% di tahun 2018 dan 11,34% di tahun 2019. Begitu pula dengan neraca perdagangan Indonesia yang mulai menurun drastis di tahun 2018 dari sebelumnya mendapatkan surplus perdagangan sebesar 11,885,487 (dalam ribu USD) menjadi -8,496,210 (dalam ribu USD) dan di tahun 2019 menjadi -3,230,381 (dalam ribu USD). Berbeda dengan neraca perdagangan ASEAN dari tahun 2016 hingga 2019 yang menunjukkan tren kenaikan (tabel 3).

Tabel 2. Kinerja Ekspor dan Impor Indonesia ke Dunia selama 2016 hingga 2019 (dalam ribu USD)

	2016	2017	2018	2019
Ekspor Indonesia ke Dunia	144,489,796	168,810,637	180,215,036	167,496,991
Impor dari dunia	135,652,800	156,925,150	188,711,246	170,727,372
Neraca Perdagangan Indonesia terhadap mitra Dunia	8,836,996	11,885,487	-8,496,210	-3,230,381

Sumber: Trademap (2020) diolah

Tabel 3. Kinerja Ekspor dan Impor Negara ASEAN ke Dunia selama 2016 hingga 2019 (dalam ribu USD)

	2016	2017	2018	2019
Ekspor ASEAN ke Dunia	1,148,042,784	1,309,448,780	1,442,590,708	1,477,270,404
Impor ASEAN dari Dunia	1,087,391,353	1,257,983,864	1,427,112,750	1,416,040,681
Neraca Perdagangan ASEAN terhadap mitra Dunia	60,651,431	51,464,916	15,477,958	61,229,723

Sumber: Trademap (2020) diolah

Gangguan Rantai Pasokan Global Selama Pandemi

Rantai pasokan global merupakan fitur utama dari perekonomian dunia saat ini. Di tahun 2020, leagilitas, ketahanan, dan keberlanjutan dari rantai pasokan telah mulai diuji Rantai Pasokan diseluruh belahan dunia saat ini telah mengalami serangkaian guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh wabah virus COVID-19 dan pandemi global, pembangkit baru terjadinya gangguan-gangguan rantai pasokan yang sangat berbeda dengan yang terjadi selama rentang waktu belakangan ini (Ivanov 2020). Saat ini, sebagian besar negara di dunia melakukan *lockdown* yang merupakan respon terhadap pentingnya kesehatan publik menyebabkan terjadinya guncangan naik dan turun pada sisi pasokan untuk melakukan proses produksi serta dari sisi permintaan konsumen, sehingga terjadi kekhawatiran tentang masa kini dan masa depan.

International Labour Organization (ILO) memproyeksikan bahwa pandemi COVID-19 akan menyebabkan penurunan jam kerja 6.7 persen, yang setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu di dunia, termasuk sekitar 125 juta pekerja penuh waktu di dunia. Asia dan Pasifik. Secara keseluruhan, tindakan melakukan jarak sosial memengaruhi sekitar 2.7 miliar pekerja, yang mewakili sekitar 81 persen dari angkatan kerja dunia dan secara langsung mempengaruhi rantai pasokan di dunia (Kimura et al. 2020). Gangguan pada rantai pasokan global diyakini secara luas akan menyebarkan krisis ke berbagai negara. Negara yang paling terpengaruh akibat terganggunya rantai pasokan global adalah negara dengan perekonomian besar seperti AS, Tiongkok, Uni Eropa dimana negara-negara tersebut mengalami guncangan penawaran dan permintaan. Mereka merupakan mitra dagang utama ASEAN, menguasai setengah (50.3%) dari total perdagangan barang ASEAN, sementara mitra dagang utama ASEAN lainnya seperti Jepang, Korea, dan Hong Kong, Cina, juga terpengaruh (ASEAN Policy Brief 2020).

Tiongkok dan negara-negara di Asia Timur selama dua dekade belakangan ini telah bekerja untuk membangun jaringan produksi yang lebih terintegrasi, dengan lebih menekankan pada kolaborasi regional dimana Tiongkok yang menjadi jantung dari rantai nilai global untuk banyak barang, baik pada penawaran maupun permintaan (George et al. 2020). Pandemi yang terjadi telah menarik perhatian pada keterkaitan di antara negara-negara yang telah melakukan globalisasi lengkap beserta konsekuensi risiko serta kerentanan yang akan terjadi. Gangguan di satu area rantai pasokan global akan mempengaruhi area lainnya dan bahkan dapat mengakibatkan pengalihan perdagangan dan investasi ke wilayah lain dalam upaya untuk mengurangi risiko penghentian produksi yang timbul dari gangguan ini (ASEAN Policy Brief 2020).

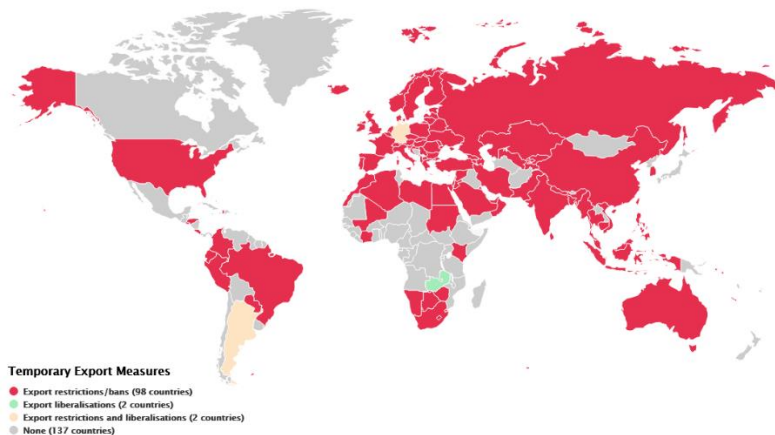
Masa depan diperkirakan akan membawa setidaknya beberapa renasionalisasi pada rantai pasokan. Renasionalisasi akan membuat ekonomi lebih tangguh jika suatu negara berencana untuk melakukan penguncian yang kurang ketat dari mitra dagangnya, dan sebaliknya (Bonadio et al. 2020). Selain itu, sangat mungkin bagi suatu negara untuk mengadopsi kebijakan proteksionis yang lebih besar dan mengenakan tarif tinggi pada impor guna mendukung industri lokal mereka tumbuh kembali meskipun tarif yang diterapkan juga berlaku untuk kelompok kerjasama ekonomi dimana negara tersebut terlibat. Negara anggota RCEP dan Taiwan menerapkan tarif untuk produk medis yang akan masuk ke negaranya (Tabel 4). Beberapa negara menetapkan nilai nol atau nilai kurang dari 5 persen (Australia, Brunei, Malaysia dan Singapura), sedangkan negara yang lainnya menetapkan nilai melebihi 5 persen bahkan beberapa menetapkan nilai relatif tinggi termasuk Indonesia untuk produk disinfektan, sabun dan pakaian pelindung. Penetapan tarif dan pembatasan ekspor dan impor produk medis juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia (Gambar 4 dan 5). Negara di wilayah Asia Timur melakukan pengetatan larangan ekspor produk medis termasuk produk pelindung diri untuk melindungi negara mereka dari kekurangan produk medis dan pelindung diri saat menghadapi pandemi di dalam negeri. Hal ini dilakukan hingga ekonomi di negara-negara industri utama telah stabil dan sangat dimungkinkan juga akan terjadi perang tarif pada barang-barang manufaktur terpilih untuk melindungi ekonomi nasional dari negara pengimpor (Sharfuddin 2020).

Tabel 4. Tarif pada produk medis yang diterapkan anggota RCEP dan Taiwan, April 2020

Kelompok Produk	Produk desinfektan dan sensitisasi	Peralatan uji COVID-19 dan peralatan terkait	Bahan medis habis pakai	Sabun	Peralatan medis lainnya	Alat pengukur suhu
Australia	4.2	1.7	1.7	5.9 ^a	0	0
Brunei Darussalam	0	0	0	4.1 ^a	0	0
Kamboja	12.3 ^b	7.3 ^a	1.2	7 ^a	2.3	15 ^b
Tiongkok	12 ^b	3.7	5.5 ^a	11.9 ^b	3.7 ^a	5.2 ^a
Taiwan	6 ^a	1.7	0	1	0	0.6
Indonesia	33.2 ^b	3.8	6.7 ^a	10.2 ^b	3.3 ^a	5 ^a
Jepang	2.4	0	0	0	0	0
Malaysia	0	0	3.3	3.8 ^a	0	0
Myanmar	14.8 ^b	3.3	1.8	6.1 ^a	2	3
Selandia Baru	0.8	1.3	0	5 ^a	0	5 ^a
Filipina	6 ^a	0.8	4	9.4 ^b	0.3	0.5
Republik Korea	24.9 ^b	2.7	5	6.5 ^a	0.9	2
Singapura	0	0	0	0	0	0
Thailand	14.9 ^b	1.2	5.8 ^a	10 ^b	0	0
Vietnam	14.8 ^b	0	4.7 ^a	22.3 ^b	0	0

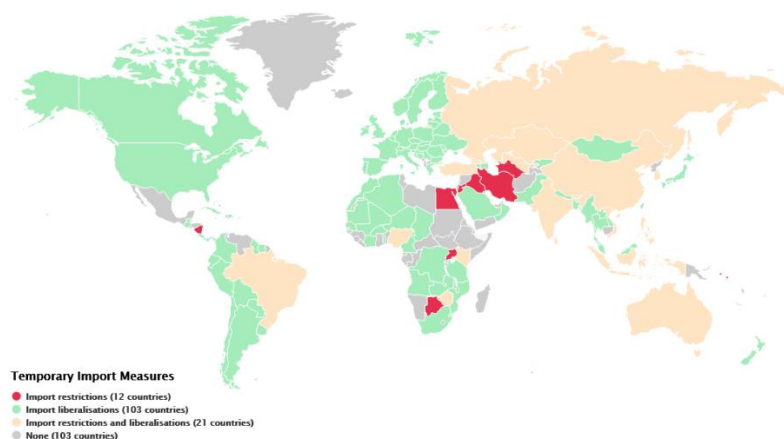
^aDibatasi, ^bSangat dibatasi.

Sumber: Kimura et al. (2020)



Sumber: <https://www.macmap.org/covid19>

Gambar 4. Produk yang terkena dampak tindakan larangan ekspor sementara termasuk termasuk alat pelindung diri (seperti masker, sarung tangan), produk farmasi, pembersih tangan, makanan produk tertentu lainnya

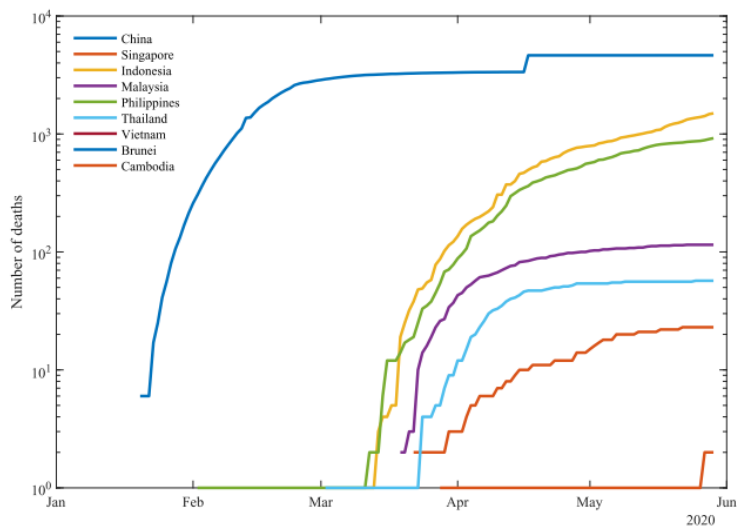


Sumber: <https://www.macmap.org/covid19>

Gambar 5. Produk yang terkena dampak tindakan larangan impor sementara termasuk termasuk alat pelindung diri (seperti masker, sarung tangan), produk farmasi, pembersih tangan, makanan produk tertentu lainnya

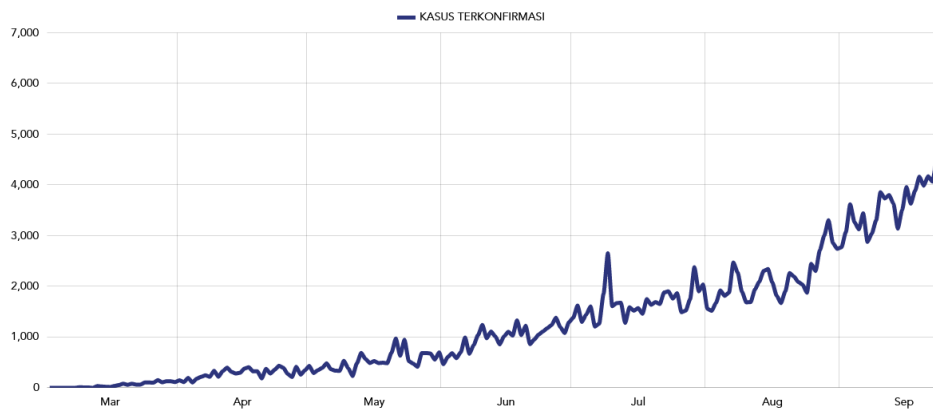
Kinerja Perdagangan Indonesia Selama Pandemi

Seperti di hampir semua negara, pandemi virus corona baru (COVID-19) berdampak negatif pada prospek pertumbuhan negara anggota ASEAN, dengan prakiraan revisi ke bawah dalam pertumbuhan ekonominya untuk semua negara anggota, kecuali Brunei (ASEAN Policy Brief 2020). Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura menghadapi tingkat pertumbuhan negatif untuk tahun 2020. Perkiraannya kemungkinan masih akan direvisi dengan penurunan lebih lanjut di akhir tahun sebagai dampak negatif dari *lockdown* ekonomi di beberapa negara anggota ASEAN pada paruh pertama tahun ini. Penyebab utama terjadinya penurunan pertumbuhan perekonomian di dunia saat ini adalah permasalahan kesehatan yang diakibatkan penularan COVID-19 yang terjadi begitu cepat. Dari segi penanganan kesehatan, Indonesia sepertinya masih jauh dari berhasil untuk menekan penyebaran COVID-19 dibandingkan negara Tiongkok dan ASEAN. Terlihat dari Gambar 6, Tiongkok dan sebagian besar negara ASEAN mulai menunjukkan pelandaian kasus kematian akibat pandemi kecuali Indonesia dan Filipina yang belum terlihat tanda-tanda akan melandai. Di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi semakin meningkat (Gambar 7) begitu juga dengan jumlah kasus meninggal (Gambar 8) sejak mula terkonfirmasi kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 (the guardian, 2020).



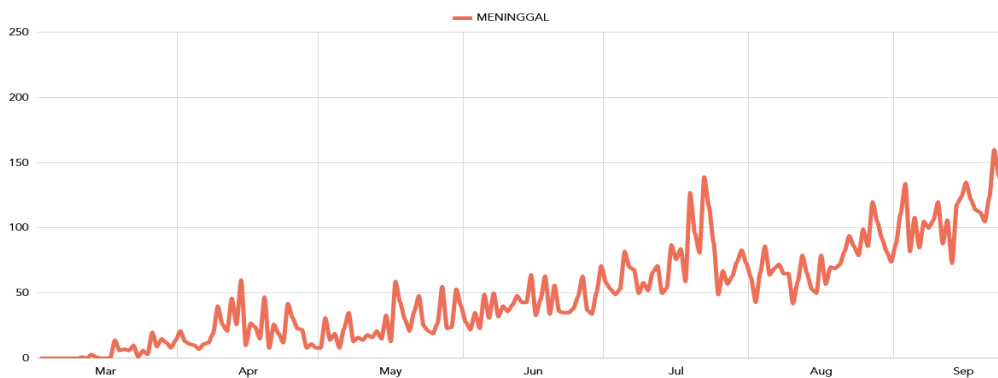
Sumber: George, Li, Lim, & Xie (2020)

Gambar 6. Kumulatif kasus kematian akibat COVID-19 di Tiongkok dan ASEAN



Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Gambar 7. Perkembangan Jumlah Kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia dari Maret hingga 24 September 2020



Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Gambar 8. Perkembangan Jumlah Kasus meninggal akibat COVID-19 di Indonesia dari Maret hingga 24 September 2020

Pada saat yang sama, ASEAN masih berada dalam situasi perang dagang antara AS dan Tiongkok yang mengakibatkan dampak bervariasi untuk setiap negara di ASEAN, tergantung pada seberapa dekat ketergantungan pada ekspor dan impor dari kedua negara. Misalnya, untuk dampak proteksionisme AS dan Tiongkok, yang paling terpengaruh adalah Thailand, Singapura, dan Malaysia. Namun, negara-negara yang tidak sepenuhnya bergantung pada kegiatan ekspor-impor dengan AS dan Cina juga telah mengalami dampak negatif yang signifikan (Ke 2019). Sebagai contoh, Indonesia dan Filipina mengalami kejatuhan pasar keuangan sebagai dampak negatif dari ini, walaupun memiliki pasar domestik yang besar (Kushaka, 2018). Hal ini disebabkan oleh posisi kedua negara yang lemah, sehingga mereka dapat mengalami depresiasi yang terlihat dari nilai rupiah dan peso yang tidak pasti. Ini menghasilkan ketidakpastian ekonomi dan sangat merugikan negara. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN, yang sebagian besar dalam tahap pengembangan, membutuhkan kerja sama dalam menghadapi dampak perang dagang antara AS dan Cina (Ke 2019). Setiap negara anggota ASEAN menghadapi tantangan dalam menjaga kapasitas produktif, menciptakan lapangan kerja dan merangsang permintaan. Negara anggota ASEAN terutama mengandalkan stimulus fiskal; tetapi mengingat partisipasi kuat mereka dalam produksi internasional dan rantai nilai global, kebijakan investasi dan perdagangan juga sama pentingnya untuk pemulihan ekonomi mereka (Yean 2020).

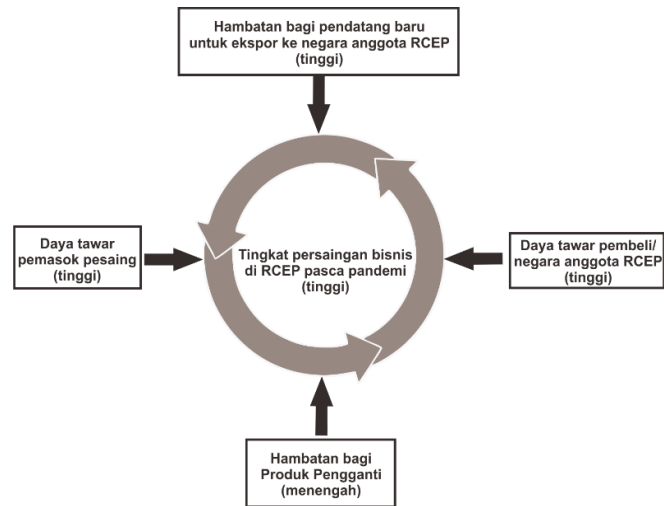
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan didasari teori analisis *Porter's Five Forces* adalah model yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis lima kekuatan kompetitif yang membentuk suatu industri dan membantu menentukan kelemahan dan kekuatan industri. Analisis *Five Forces* sering digunakan untuk mengidentifikasi struktur industri untuk menentukan strategi perusahaan. Model Porter dapat diterapkan pada setiap segmen ekonomi untuk memahami tingkat persaingan dalam industri dan meningkatkan profitabilitas

jangka panjang suatu perusahaan (Bruijl 2018). Analisis persaingan kedepan Indonesia pasca pandemi dalam kerjasama RCEP dilakukan pada 5 hal yaitu:

- a. Hambatan bagi Indonesia untuk ekspor ke negara anggota RCEP (tinggi)
 - Hambatan masuk ke negara importir akibat belum tuntasnya pandemi di Indonesia
 - Turunnya daya beli akibat resesi ekonomi di negara importir
 - Perubahan jalur rantai pasokan dari global ke regional
- b. Daya tawar pembeli / negara anggota RCEP (tinggi)
 - Perubahan pola konsumsi produk impor di negara importir
 - Kemampuan importir untuk mengganti penyedia barang akibat pengetatan masuk wilayah dan faktor kesehatan dari negara eksportir
- c. Daya tawar pemasok pesaing (tinggi)
 - Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan importir
 - Hubungan kerjasama bilateral perdagangan antara negara pemasok pesaing dengan negara importir
 - Kemampuan penanganan pandemi di negara pemasok untuk mencegah transmisi pandemi ke negara pembeli
- d. Hambatan bagi produk pengganti (menengah)
 - Pengetatan aspek kesehatan untuk produk yang akan masuk ke negara importir
 - Renasionalisasi pada rantai pasokan yang ada akibat dari pengetatan masuk wilayah
- e. Tingkat persaingan Bisnis di RCEP pasca pandemi (tinggi)
 - Jumlah dan kemampuan pesaing pada sesama anggota RCEP
 - Pertumbuhan industri di negara anggota RCEP untuk menunjang permintaan ekspor

Kelima hal di atas diukur tingkat tinggi dan rendahnya kekuatan yang ada untuk melihat posisi Indonesia dalam RCEP kedepannya, terutama setelah terjadi pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasokan global. Dari kelima hal tersebut global, diperoleh asumsi (Gambar 9) untuk melihat apakah kerjasama RCEP masih dapat menguntungkan perdagangan Indonesia kedepannya setelah terjadinya perubahan dunia akibat pandemi.



Gambar 9. Analisis Tingkat Persaingan Bisnis di RCEP Pasca Pandemi

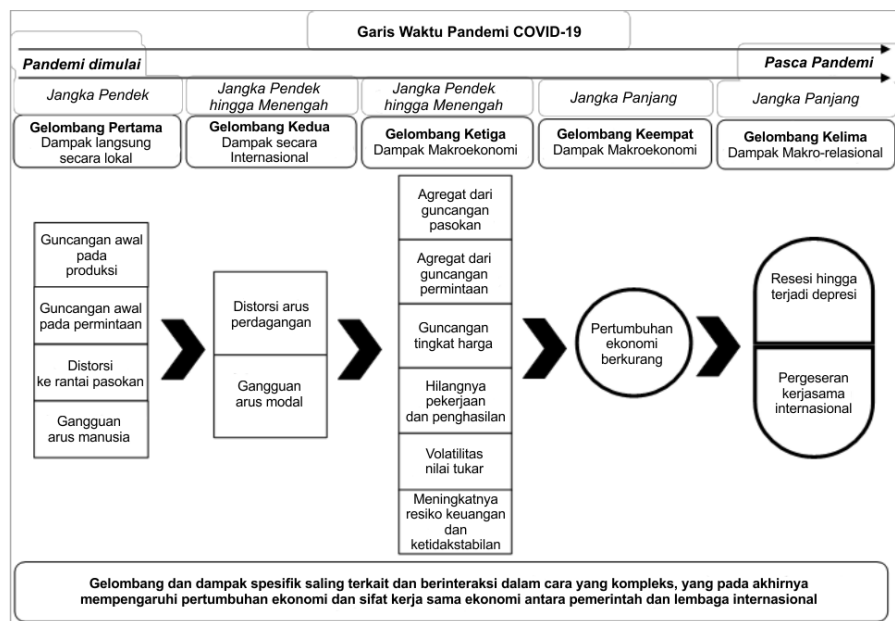
HASIL dan PEMBAHASAN

Guncangan saat ini muncul mendadak dibandingkan pandemi sebelumnya dan memiliki dampak global besar serta ketidakpastian tentang pemulihan. Pandemi telah mengubah arus globalisasi dan mengarah untuk berfokus secara regional sebagai akibat dari kelemahan mendasar dalam globalisasi dan sebagai tanggapan terhadap gangguan pandemi COVID-19 (Enderwick, Enderwick, and Jennings 2020). Selain itu, perubahan dapat mengarah pada perubahan struktural dalam proses globalisasi ekonomi jika waktu untuk pemulihan berlangsung lama yang berakibat semakin besar perubahan pada hubungan dan tata kelola perdagangan internasional (Ciglovska 2020). Dampak penuh COVID-19 tidak akan diketahui secara pasti dalam beberapa waktu kedepan, tetapi efek susulan yang berlangsung lama dari pandemi ini tidak bisa dihindari. Krisis yang diakibatkan COVID-19 memiliki sifat yang berbeda, dengan resesi yang cenderung berasal dari jasa dan aktivitas domestik lebih terkait daripada masalah keuangan perdagangan, seperti pada 2008-2009. Implikasi makroekonomi yang terjadi juga berbeda (Guerrieri et al. 2020). Dana Moneter Internasional telah memproyeksikan bahwa pertumbuhan di negara berkembang dan berkembang di Asia akan turun dari 5.5 persen pada 2019 menjadi 1.0 persen pada 2020, dan di Amerika Serikat hampir dua kali lipat, dari 2.3 persen menjadi -5.9 persen (Petri and Plummer 2020) dengan proyeksi penurunan PDB secara global akan jatuh lebih dari 2% di tahun 2020 (Kimura et al. 2020).

Indonesia sendiri, sebelum RCEP, tidak terlalu serius dalam menyikapi peluang dan tantangan integrasi ekonomi regional karena Indonesia menghadapi kendala internal seperti ketidakstabilan politik, meningkatnya terorisme, infrastruktur yang memburuk dan peraturan ketenagakerjaan yang lebih ketat dalam pelaksanaan kerjasama perdagangan bebas antara ASEAN dan Tiongkok dalam ACFTA. Ketidaksiapan ini mengakibatkan belum siapnya Indonesia memberikan dukungan yang memadai untuk sektor-sektor yang terkena dampak

negatif dari ACFTA sehingga implementasi ACFTA tidak membawa manfaat ekonomi yang signifikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia (Wang 2019). Indonesia terlihat mulai menjadi negara yang bergantung pada produk impor seiring dengan berjalannya kerjasama RCEP (Tabel 2) dan juga di ASEAN (Tabel 3).

Terkait COVID-19, Indonesia hingga saat ini masih terjebak dalam masalah kesehatan akibat pandemi dan belum menunjukkan tanda-tanda pelandaian pertambahan kasus baru (Gambar 7). Hal ini tidak hanya membuat perekonomian Indonesia dapat terjebak dalam resesi yang berkepanjangan, dan jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan terjadinya depresi dikarenakan hingga saat ini, Indonesia belum menunjukkan terjadinya puncak pertama dari pandemi (gelombang pertama) dan juga belum menunjukkan perlambatan munculnya kasus baru. Indonesia saat ini telah mengalami perlambatan pertumbuhan perekonomian sebesar -1.26% pada kuartal I dan -5.32% pada kuartal II ([BPS] Badan Pusat Statistik 2020) serta diprediksi 10.7 hingga 12.7 orang akan kehilangan pekerjaan (CNN Indonesia 2020) seperti prediksi yang akan terjadi pada gelombang ketiga dari dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 (Gambar 10).

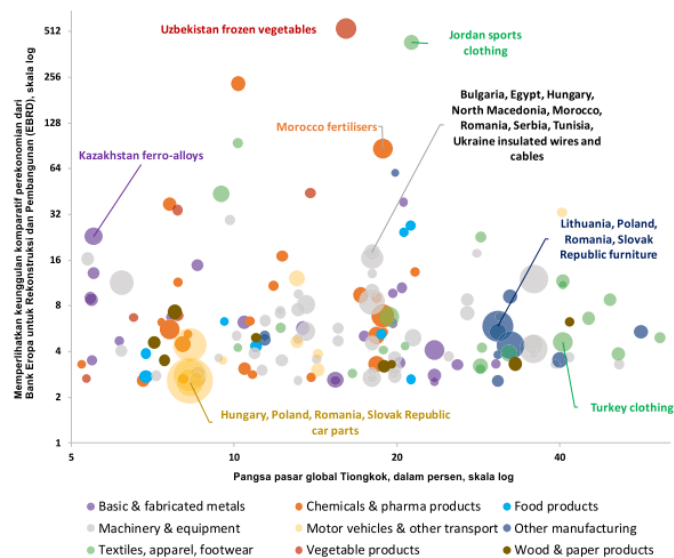


Sumber: Barua (2020)

Gambar 10. Pemetaan umum kemungkinan dampak ekonomi akibat COVID-19

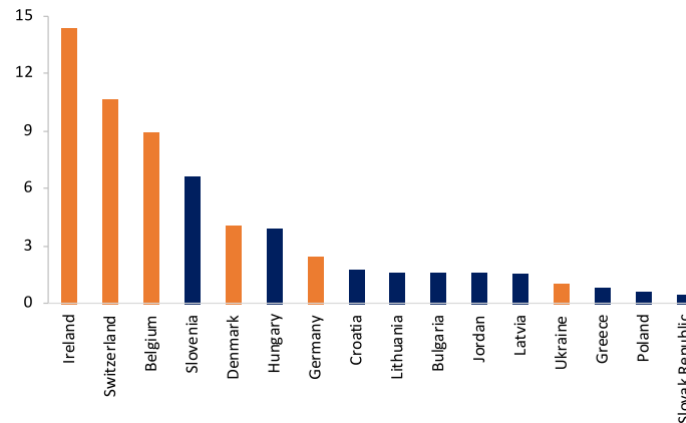
Situasi ini dapat diperburuk dengan terjadinya pergeseran pada kerjasama internasional (Gambar 10) akibat dari pengetatan isolasi wilayah antar negara terutama pada wilayah perbatasan untuk mencegah peluang penularan dari luar negara tersebut (Kimura et al. 2020) dan Indonesia akan terkena dampak kebijakan ini jika tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam menekan angka pertumbuhan jumlah orang tertular di dalam negerinya. Sebagai contoh, pada minggu keempat Januari 2020 saat Tiongkok memutuskan untuk mengunci kota

Wuhan dan mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus ke seluruh negeri. Perusahaan manufaktur di seluruh dunia dengan cepat terpukul akibat keputusan tersebut. Produsen mobil Hyundai menghentikan semua produksinya di Korea pada 7 Februari 2020 karena kekurangan komponen yang keluar dari Tiongkok (Miroudot 2020). Hal ini memicu perusahaan-perusahaan Internasional yang memiliki tempat produksi di negara yang belum dapat mengendalikan pandemi di dalam negerinya akan mulai memindahkan tempat produksinya ke negara lain yang lebih dekat agar rantai pasokannya semakin dekat dengan mereka (Barua 2020) (Barua 2020) bahkan melakukan *reshoring* dengan menggunakan otomatisasi untuk mengurangi biaya tenaga kerja (Javorcik 2020). Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga atau yang jaraknya relatif dekat dengan negara investor untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi pasca pandemi karena investasi langsung asing (FDI) dapat digunakan oleh negara tetangga tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi domestik, membuka lapangan kerja dan pengembangan industri mereka melalui transfer teknologi dari negara investor (OECD 2020). Perubahan ini dapat memicu masuknya FDI ke negara-negara tetangga yang kurang populer, sebagai contoh, banyak negara di Eropa Timur dan Mediterania bagian timur dan selatan memiliki keunggulan komparatif dalam produk yang diekspor dari Tiongkok (Gambar 11), dan negara-negara Eropa Timur sudah mengekspor produk farmasi (Gambar 12) (Javorcik 2020).



Catatan: Angka-angka tersebut berkaitan dengan kode HS 4 digit pada tahun 2018. Ukuran gelembung menunjukkan volume ekspor absolut dalam jutaan USD
 Sumber: Javorcik (2020)

Gambar 11. Negara-negara yang mendapat manfaat perubahan rantai nilai global



Catatan: Ekspor ditujukan untuk semua kode HS 4 digit farmasi
 Sumber: Javorcik (2020)

Gambar 12. Ekspor produk farmasi sebagai bagian dari PDB, 2018 (%)

SIMPULAN

Indonesia harus memikirkan ulang posisinya di RCEP karena Indonesia, sebelum terjadi pandemi, bergerak menjadi negara yang lebih suka terhadap produk impor, baik dari negara sesama anggota RCEP (Gambar 2) maupun terhadap dunia (Tabel 2), dibandingkan mengembang industri dalam negeri yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga industri yang berorientasi ekspor. Posisi ini dapat membuat Indonesia menjadi target pasar bagi negara anggota RCEP dikarenakan “bonus demografi” yang tidak dapat dimanfaatkan Indonesia dalam kerangka RCEP.

Dengan prediksi menurunnya perdagangan barang di dunia saat ini antara 13 dan 31% pada tahun 2020 dan turunnya Investasi Langsung Asing (FDI) antara 30 dan 40% di dunia akibat pandemi (Kowalski 2020), Indonesia harus lebih serius dan cepat mengatasi situasi kesehatan dan membuat pilihan kebijakan yang tepat dalam menghadapi pandemi ini. Pandemi ini mengajarkan Indonesia untuk menjaga “kelangsungan hidup” dari rantai pasokannya dengan tetap mengedepankan kesehatan dari warganya guna mencegah larinya investasi dari Indonesia akibat ketidakpercayaan investor terhadap cara penanggulangan pandemi di Indonesia.

Indonesia dapat mendorong ekspornya dimasa pandemi ini dengan mengeksport produk-produk yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi pandemi, seperti mengeksport produk pengaman diri yang menggunakan teknologi rendah, dengan berkomitmen untuk tidak mengenakan tarif baru atau mengurangi pembatasan ekspor untuk produk tersebut. Cara ini dapat meningkatkan kepercayaan pasar dari negara-negara yang saat ini sedang membutuhkan produk pengaman diri. Selain itu, Indonesia harus mulai memperbaiki kesiapan industri dalam negeri yang terkait dengan jaringan produksi global agar lebih siap secara kelembagaan dan kerjasama regional untuk menghadapi dan merespon lebih awal ketika salah satu mitra dagang utama mengalami pandemi atau gangguan lainnya dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2020. "Berita Resmi Statistik 5 Agustus 2020." *Bps.Go.Id* No 64/08/T(27): 1-52. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/336/indeks-pembangunan-manusia-provinsi-papua-tahun-2017.html>.
- ASEAN Policy Brief. 2020. "Economic Impact of Covid-19 Outbreak on ASEAN." *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* (April): 1-17. https://asean.org/storage/2020/04/ASEAN-Policy-Brief-April-2020_FINAL.pdf.
- Barua, Suborna. 2020. "COVID-19 Pandemic and World Trade: Some Analytical Notes." *SSRN Electronic Journal* (April): 1-35.
- Bonadio, Barthélémy, Zhen Huo, Andrei A. Levchenko, and Nitya Pandalai-Nayar. 2020. "Global Supply Chains in the Pandemic." *NBER Workign Paper Series* (27224): 48.
- Bruijl, Gerard H. Th. 2018. "The Relevance of Porter's Five Forces in Today's Innovative and Changing Business Environment." *SSRN Electronic Journal* (January).
- Chaisse, Julien, and Richard Pomfret. 2019. "The RCEP and the Changing Landscape of World Trade : Assessing Asia-Pacific Investment Regionalism next Stage." *Law and Development Review* 12(1): 159-90.
- Chandran, Sarath. 2018. "India in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Need for Caution." *SSRN Electronic Journal*.
- Ciglovska, Biljana. 2020. "THE GLOBAL INTERNATIONAL TRADE UNDER THE PRESSURE OF COVID 19 PANDEMIC – CONSQUENCES." In *Scientific Challenges for Sustainable Development - SCfSD20, , 25-36*.
- CNN Indonesia. 2020. "Bappenas Proyeksi Jumlah Pengangguran 12,7 Juta Tahun Depan." *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200622165157-92-516112/bappenas-proyeksi-jumlah-pengangguran-127-juta-tahun-depan>.
- Department of State - United States of America. 2019. "A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision." <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf>.
- Enderwick, Peter, Buckley Enderwick, and Peter Jennings. 2020. "Rising Regionalization: Will the Post-COVID-19 World See a Retreat from Globalization?" *Transnational Corporations Journal* 27(2): 99-112.
- Gao, Hongzhi, and Monica Ren. 2020. "Overreliance on China and Dynamic Balancing in the Shift of Global Value Chains in Response to Global Pandemic COVID-19: An Australian and New Zealand Perspective." *Asian Business and Management* 19(3): 306-10. <https://doi.org/10.1057/s41291-020-00121-3>.
- Gaur, Pankhuri. 2020. "India's Withdrawal from RCEP: Neutralising National Trade Concerns." *Journal of the Asia Pacific Economy* 0(0): 1-19. <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1809772>.
- George, Ammu, Changtai Li, Jing Zhi Lim, and Taojun Xie. 2020. "Propagation of Epidemics' Economic Impacts via Production Networks: The Cases of China and ASEAN during SARS and COVID-19." *SSRN Electronic Journal*: 1-31.
- Guerrieri, Veronica, Guido Lorenzoni, Ludwig Straub, and Ivan Werning. 2020.

- Macroeconomic Implications of Covid-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages?* <http://www.nber.org/papers/w26918>.
- Hsieh, Pasha L. 2019. "Building the RCEP: Legal and Political Implications." *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 113: 367–70.
- Hsieh, Pasha L et al. 2017. "IILJ Working Paper 2017 / 4 MegaReg Series The RCEP , New Asian Regionalism and the Global South."
- Ivanov, Dmitry. 2020. "Viable Supply Chain Model: Integrating Agility, Resilience and Sustainability Perspectives—Lessons from and Thinking beyond the COVID-19 Pandemic." *Annals of Operations Research*. <https://doi.org/10.1007/s10479-020-03640-6>.
- Javorcik, Beata (EBRD). 2020. "Global Supply Chains Will Not Be the Same in the Post-COVID-19 World." In *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*, eds. Richard E Baldwin and Simon J Evenett. London, UK: CEPR Press, 111–16. www.cepr.org.
- Ke, Heren. 2019. "ASEAN in the Middle of US and Chinese Rivalry: ASEAN Cooperation with RCEP in Reducing the Impact of the Trade War." *International Journal of Science and Society* 1(1): 1–12. <http://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/1>.
- Kimura, Fukunari, Shandre Mugan Thangavelu, Dionisius Narjoko, and Christopher Findlay. 2020. "Pandemic (COVID-19) Policy, Regional Cooperation and the Emerging Global Production Network†." *Asian Economic Journal* 34(1): 3–27.
- Kowalski, Przemyslaw. 2020. "Will the Post-COVID World Be Less Open to Foreign Direct Investment?" In *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*, eds. Richard E Baldwin and Simon J Evenett. London, UK: CEPR Press, 131–49. https://voxeu.org/system/files/epublication/Covid-19_and_Trade_Policy.pdf.
- Li, Qiaomin, and Hee Cheol Moon. 2018. "The Trade and Income Effects of RCEP: Implications for China and Korea." *Journal of Korea Trade* 22(3): 306–18.
- Mahadevan, Renuka, and Anda Nugroho. 2019. "Can the Regional Comprehensive Economic Partnership Minimise the Harm from the United States–China Trade War?" *World Economy* 42(11): 3148–67.
- Miroudot, Sébastien. 2020. "Resilience versus Robustness in Global Value Chains: Some Policy Implications." In *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*, eds. Richard E Baldwin and Simon J Evenett. London, UK: CEPR Press, 200. <https://voxeu.org/content/covid-19-and-trade-policy-why-turning-inward-won-t-work>.
- Mueller, Lukas Maximilian. 2019. "ASEAN Centrality under Threat—the Cases of RCEP and Connectivity." *Journal of Contemporary East Asia Studies* 8(2): 177–98. <https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1691703>.
- OECD. 2020. "Impact of the Corona Virus (COVID-19) Crisis on Development Finance." *Tackling Coronavirus (Covid-19): Contributing to a Global Effort*. [https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134569-xn1go1i113&title=The-impact-of-the-coronavirus-\(COVID-19\)-crisis-on-development-finance](https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134569-xn1go1i113&title=The-impact-of-the-coronavirus-(COVID-19)-crisis-on-development-finance).
- Petri, Peter A, and Michael G Plummer. 2020. *East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs*.
- Santos-Paulino, Amelia U. 2019. "The Asian Economic Integration Cooperation

- Agreement: Lessons from Economic and Social Development.” 2019 *United Nations Environment Assembly Study Guide*.
- Sharfuddin, Syed. 2020. “The World after Covid-19.” *Round Table* 109(3): 247–57. <https://doi.org/10.1080/00358533.2020.1760498>.
- Wang, Heng. 2019. “Building toward the RCEP? Reflections on the ASEAN-China FTA.” *ASEAN Law in the New Regional Economic Order*: 46–63.
- Yean, Tham Siew. 2020. “The Hosting of International Production in ASEAN , Post-Pandemic.” *ISEAS Perspective* (71): 1–13. https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/12163/ISEAS_Perspective_2020_71.pdf?sequence=1.